

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Palang Merah atau Bulan Sabit Merah merupakan salah satu institusi sosial kemanusiaan tertua di dunia yang eksistensinya dibutuhkan banyak negara di dunia. Palang Merah Indonesia, sebagai suatu Perhimpunan Nasional yang bernaung di bawah UU NO.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sudah selayaknya dapat dihayati keberadaannya oleh masyarakat sehingga rasa memiliki terhadap organisasi kemanusiaan ini dapat segera tertanam secara luas di seluruh penjuru tanah air.

Berdirinya Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sebagai lembaga kemanusiaan bermula pada 24 Juni 1859. Saat itu di kota Solferino, Italia, terjadi perang antara pasukan Austria melawan pasukan Prancis yang saat itu menjadi sekutu dari Sardinia. Perang yang bertujuan untuk mengusir Austria dari wilayah Utara Sardinia ini melibatkan ± 300.000 prajurit dari kedua belah pihak. Keesokan harinya, terdapat ± 20.000 prajurit dari kedua belah pihak yang terluka parah dan tergeletak di tanah pada hari itu. Pasca berakhirnya Perang Solferino inilah, muncul seorang tokoh berkebangsaan Swiss bernama Jean Henry Dunant yang saat itu menjadi tenaga medis darurat untuk menyelamatkan para prajurit dari kedua belah pihak yang terluka akibat Perang Solferino ini (Brown, 1988). Dunant menuliskan pengalamannya

tersebut menjadi sebuah buku yang berjudul *Un Souvenir de Solferino* yang artinya “Sebuah Kenangan tentang Solferino”. Buku ini tidak hanya memuat tentang gambaran Perang Solferino yang mengakibatkan penderitaan bagi puluhan ribu prajurit dari kedua belah pihak (Austria & Prancis), tetapi yang terpenting adalah gagasannya yang ia tuangkan ke dalam buku tersebut mengenai perlu didirikannya sebuah Organisasi Kemanusiaan internasional yang bersifat netral untuk memberikan bantuan medis bagi prajurit yang terluka ataupun sakit dalam medan pertempuran tanpa adanya diskriminasi (Dunant, 1862). Gagasannya tersebut menarik perhatian dari Gustave Moynier, Ketua dari sebuah organisasi besar di Swiss bernama The Geneva Public Welfare Society (GPWS) yang bergerak pada bidang kesejahteraan sosial (Baumann, 1988). Dunant dan Moynier melanjutkan penyampaian gagasan kemanusiaan ini kepada Pemerintah Swiss. Alhasil, gagasannya tersebut berhasil mendapatkan dukungan resmi dari Pemerintah Swiss pada 12 September 1863 yang kemudian berlanjut ke Konferensi tingkat Internasional yang diselenggarakan di Jenewa pada 26 – 29 Oktober 1863. Konferensi Internasional ini dihadiri oleh 31 perwakilan dari 16 Negara, yaitu 6 negara yang sekarang menjadi bagian dari Jerman (Baden, Bavaria, Hesse-Darmstadt, Sachsen, Hannover dan Hutenberg), Prusia (sekarang merupakan nama dari Jerman itu sendiri), Austria, Inggris, Italia, Prancis, Spanyol, Swedia, Norwegia, Belanda dan Swiss. Konferensi Internasional ini dipimpin oleh Gustave Moynier yang menetapkan untuk dibentuknya satu organisasi

kemanusiaan internasional yang bersifat netral dengan nama *International Comitee of The Red Cross* (ICRC) atau Komite Internasional Palang Merah serta menghasilkan 10 pasal yang ditetapkan pada 29 Oktober 1863 (Hoofdbestuur van Het Nederlandsche Roode Kruis, 1965). Dimana pasal 1 dari 10 pasal ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya Organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di setiap negara, termasuk Indonesia dengan Palang Merah Indonesia. Pasal ini berbunyi "Di setiap negara akan dibentuk suatu komite yang bertugas untuk membantu Dinas Kesehatan Militer. Komite tersebut harus diorganisasikan dengan baik dan benar" (Pictet, 1951).

Menyikapi pasal 1 yang ditetapkan pada 29 Oktober 1863 di Konferensi Internasional yang telah diselenggarakan di Jenewa, Palang Merah Belanda (*Het Nederlandsche Rode Kruis*) yang telah berdiri sejak 19 Juli 1867, mengirim telegram pada 2 Agustus 1870 kepada Pemerintah Belanda di Batavia (sekarang Jakarta) untuk mendirikan Palang Merah Belanda cabang Hindia-Belanda (Verspyck & Nijerk, 1966). Pada 8 Oktober 1870, dilaksanakan pertemuan umum oleh Jules Felicien Romain Stanislas/JFRS van den Bossche yang merupakan utusan Pemerintah Belanda untuk menindaklanjuti isi pesan telegram tersebut. Untuk mewujudkan ketentuan dasar yang dijadikan sebagai pedoman, maka atas kesepakatan dengan induk organisasi Palang Merah Belanda di Den Haag, pada tanggal 2 September 1872 di Batavia, ditandatangani statuta *Nederlandsche Indische Rode Kruis*

atau disingkat NIRK yang merupakan tonggak resmi dari berdirinya Palang Merah Hindia-Belanda dengan diketuai oleh JFRS van den Bossche (“Officieel Orgaan Van Het Nederlandse Rode Kruis Afdeling Indonesie = Majalah Resmi Palang Merah Belanda Tjabang Indonesia,” 1948).

Seiring dengan berjalannya waktu yang dibarengi oleh berkembangnya pendidikan rakyat Indonesia, para kaum intelektual pribumi berusaha untuk membentuk organisasi Palang Merah yang bersifat kebangsaan. Niatan ini mulai terpancar dari buah pikiran dr. Rumondor Cornelis Lefrand (RCL) Sandoek dan Prof. Dr. dr. Bahder Djohan yang aktif dalam bidang kesehatan (Ali Amran, 1980). Pada tahun 1940, keduanya menyampaikan pendapat mereka tentang pendirian Palang Merah bagi kaum pribumi pada Kongres NIRK. Namun, pendapat mereka mendapat penolakan oleh forum yang bahkan diiring dengan cibiran oleh salah seorang peserta kongres yang berbunyi “*de inlander weet niet wat menschelijk is*” yang artinya “orang pribumi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kemanusiaan” (H. Umar Mu’in, 1999).

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, ada tanggung jawab yang harus diemban oleh Pemerintah Indonesia saat itu mengenai urusan penyelesaian tawanan perang Jepang yang umumnya terdiri dari orang-orang Eropa, dimana diperlukan peran pihak ketiga yang bersifat netral seperti Komite Internasional Palang Merah yang tentunya juga perlu

didirikannya Palang Merah Indonesia sebagai Perhimpunan Nasional untuk menyertainya (Mochtar Kusumaatmadja, 1979). Buah pikiran tersebut dikemukakan oleh dr. Boentaran Martoatmodjo, Menteri Kesehatan RI pertama kepada Ir. Soekarno selaku Presiden RI. Presiden pun mengamanahkan usulan tersebut untuk didiskusikan bersama dengan Wakil Presiden, Drs. Mohammad Hatta (Palang Merah Indonesia, 2015).

Usul untuk mendirikan Palang Merah Indonesia secara resmi diajukan oleh dr. Boentaran kepada Wakil Presiden pada 3 September 1945 yang kemudian mendapatkan persetujuan bahkan anjuran untuk segera membentuk suatu panitia dalam rangka pendirian organisasi kemanusiaan yang bersifat netral ini. Sebagai tindak lanjut dari anjuran Wakil Presiden tersebut, dr. Boentaran membentuk Panitia Lima yang terdiri dari dr. R. Mochtar sebagai ketua, dr. Bahder Djohan sebagai penulis, dr. Djoehana, dr. Marzoeki dan dr. Sitanala sebagai anggota. Tujuan utama dari pembentukan Panitia Lima adalah untuk menyusun kepengurusan Perhimpunan Palang Merah Indonesia yang terdiri dari para petinggi negara. Hingga saat tepat satu bulan pasca kemerdekaan Indonesia, yakni 17 September 1945, sejarah kepalangmerahan sebagai suatu Perhimpunan Nasional secara resmi ditandai dengan pelantikan Pengurus Besar Palang Merah Indonesia oleh Wakil Presiden Indonesia yang pertama, Drs. Mohammad Hatta, yang sekaligus menjabat sebagai ketua pertama Palang Merah Indonesia (PMI) (Markas Besar Palang Merah Indonesia, 1951).

Keabsahan PMI sebagai suatu perhimpunan nasional secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) No. 25 tahun 1950, atau lebih tepatnya pada 16 Januari 1950. Penegasan tersebut bukan sekedar memberikan landasan hukum bagi PMI sebagai organisasi sosial, namun juga memiliki latar belakang pertimbangan dan tujuan yang bersifat Internasional (Sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Konvensi Jenewa yang keduanya berlangsung pada tahun 1949). Dengan telah terpenuhinya satu persyaratan penting yang ditentukan oleh Konvensi Jenewa 1949, yakni diakui oleh pemerintah nasional, maka PMI secara resmi mendapat pengakuan dari *International Committee of the Red Cross* (ICRC) pada 15 Juni 1950 (ICRC, 2011) yang selanjutnya melalui Sidang Dewan Gubernur Liga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional pada 16 Oktober 1950, PMI secara resmi dinyatakan sebagai anggota Liga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang ke-68 (Latif Bustami, 2014). Dengan telah dipenuhinya segala persyaratan hukum, baik secara nasional maupun Internasional, serta diakuinya sebagai anggota Liga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang ke-68 pada 16 Oktober 1950, maka pergerakan PMI sebagai suatu organisasi yang bergerak di bidang sosial guna memberikan segala bantuan yang bersifat kemanusiaan dapat dilaksanakan dengan memiliki kelegalitasan yang jelas (Karmaputra, 1976).

Memasuki era Orde Lama, PMI terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh dinamika internal maupun eksternal. Dinamika internal yang

mempengaruhi perkembangan PMI di era Orde Lama adalah bertambahnya jumlah keanggotaan PMI yang berlanjut pada pembentukan cabang-cabang PMI di setiap Provinsi hingga Kabupaten/Kota di Indonesia yang dibahas dalam 2 kongres PMI yang berlangsung pada tahun 1959 dan 1963. Sedangkan untuk dinamika eksternal yang mempengaruhi perkembangan PMI di era Orde Lama yang akan menjadi pembahasan adalah pidato dari Presiden Pertama Republik Indonesia, yaitu Ir, Soekarno di Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 8 Maret 1963, dalam rangka Peringatan 100 Tahun Palang Merah Internasional yang berisikan tentang pernyataan tegas Presiden Soekarno tentang bergabungnya Indonesia dalam kegiatan kepalangmerahan karena didasari dengan keinginan tulus rakyat Indonesia yang akan selalu mendukung pergerakan positif apapun yang berkaitan dengan kemerdekaan sebuah bangsa dan kegiatan kemanusiaan tanpa pandang bulu.

Oleh sebab itu, penulis merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi, maupun bagi masyarakat luas terkait menyebarluaskan informasi salah satu organisasi sosial kemanusiaan terbesar di Indonesia yang bernama Palang Merah Indonesia dengan cara mempelajari tentang sejarah perkembangannya, khususnya di era Orde Lama, yakni sejak tahun 1959 – 1963.

Penulis menemukan penelitian yang relevan berupa skripsi dari Universitas Hasanuddin yang juga membahas peranan Palang Merah Indonesia di era yang sama dengan judul penelitian “Eksistensi Palang Merah

Indonesia Cabang Parepare (1962 – 1970)” (Nasruddin, 2022). Akan tetapi berdasarkan judul tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan, yakni penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi tersebut hanya berfokus pada Eksistensi Palang Merah Indonesia Cabang Parepare, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan lebih luas, yakni tentang pergerakan Palang Merah Indonesia secara keseluruhan atau nasional selama era orde lama. Jadi, penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya berfokus pada satu cabang Palang Merah Indonesia saja seperti penelitian skripsi tersebut, sebagai contoh Palang Merah Indonesia Cabang DKI Jakarta. Selain itu, era yang diambil oleh penelitian sebelumnya juga tidak sepenuhnya sama dengan era yang akan penulis lakukan. Pada skripsi tersebut, era penelitian yang diambil adalah dari tahun 1962 – 1970, dimana pada rentang era tersebut, terdapat dua era orde pemerintahan yang berbeda di Indonesia, yakni era Orde Lama yang baru berakhir pada 20 Februari 1966 saat lengsernya Ir. Soekarno dari kursi Presiden RI dan era setelahnya (1966 – 1970) sudah merupakan era Orde Baru dibawah pemerintahan Presiden Soeharto yang dilantik menjadi Presiden RI pada 26 Maret 1968. Sedangkan rentang era penelitian yang akan penulis ambil adalah hanya era Orde Lama, yakni sejak Kongres Palang Merah Indonesia ke-VII pada 9 - 13 Februari 1959 hingga 13 - 16 Mei 1963 saat Kongres Palang Merah Indonesia ke-VIII.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Secara spasial, penelitian ini akan membahas sejarah organisasi kepalangmerahan di Indonesia, yakni Palang Merah Indonesia sebagai organisasi kemanusiaan yang bersifat netral.

Secara temporal, diawali pada tahun 1959 yang merupakan awal dari era Orde Lama. Diakhiri tahun 1963 tepat setelah Kongres Palang Merah Indonesia ke-VIII.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Apa saja dinamika Internal yang mempengaruhi perkembangan organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) selama era Orde Lama?
- Dinamika Eksternal apa saja yang mempengaruhi perkembangan organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) selama era Orde Lama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Mengetahui sejarah perkembangan organisasi kepalangmerahan

di Indonesia, yakni Palang Merah Indonesia (PMI) di era Orde Lama.

2. Kegunaan

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kegunaan penelitian ini yaitu:

- **Kegunaan Teoritis:** Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah referensi penelitian terkait bidang kepalangmerahan di Indonesia, khususnya pada era Orde Lama.
- **Kegunaan Praktis:** Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kajian untuk lebih mengenal tentang sejarah organisasi kepalangmerahan di Indonesia, yakni Palang Merah Indonesia atau yang biasa dikenal dengan penyebutan singkatannya, yakni PMI yang telah dilindungi oleh UU NO.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga, secara tidak langsung Skripsi ini juga bermanfaat bagi Palang Merah Indonesia itu sendiri sebagai referensi tambahan untuk lebih mengenal sejarah perkembangan Palang Merah Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah atau disebut dengan metode historis. Metode historis terdiri dari lima tahapan, yaitu: pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sejarah), interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah) (Kuntowijoyo, 2005).

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik diartikan sebagai proses dimana penulis menentukan topik yang ingin diteliti. Pemilihan topik terbagi menjadi dua yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional yakni dikarenakan penulis sendiri merupakan anggota dari organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Keanggotaan tersebut penulis dapatkan setelah melalui serangkaian proses, bermula dari mendaftarkan diri sebagai anggota Korps Suka Rela Palang Merah Indonesia Unit Universitas Negeri Jakarta yang dikenal dengan KSR PMI Unit UNJ di tahun yang sama saat penulis menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial (kini Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum), Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2019. KSR PMI Unit UNJ

merupakan gerakan cabang Palang Merah Indonesia unit perguruan tinggi. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya dalam pembahasan ini adalah Jakarta, pada tahun 2020, menyebabkan banyak orang, tidak terkecuali anggota Palang Merah Indonesia maupun KSR PMI Unit UNJ itu sendiri yang terjangkit virus tersebut sehingga diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri. Saat itu, penulis merupakan salah satu yang tidak terjangkit virus Covid-19, sehingga penulis diangkat sebagai anggota resmi Palang Merah Indonesia banyak diterjunkan oleh pihak Palang Merah Indonesia tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur untuk melakukan berbagai kegiatan kepalangmerahan semasa pandemi Covid-19, salah satunya adalah kegiatan spraying disinfektan ke berbagai tempat di wilayah Administrasi Kota Jakarta Timur, yang diantaranya adalah Kampus A dan Kampus B Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan untuk alasan kedekatan intelektual penulis adalah penulis merupakan seorang mahasiswa program studi pendidikan sejarah yang banyak mempelajari sejarah gerakan organisasi kepalangmerahan di Indonesia, bahkan penulis juga sempat mengajarkan terkait sejarah terbentuknya Palang Merah Internasional kepada murid-murid anggota Palang Merah Remaja (PMR) di salah satu SMA di Jakarta. Hal tersebut yang mendorong penulis melakukan penelitian ini.

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik diartikan sebagai kegiatan menemukan sumber sejarah. Sumber sejarah umumnya dibagi menjadi dua jenis, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dan arsip Palang Merah Indonesia yang terdapat di gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang terletak di Jl. Ampera Raya no. 7, Jakarta Selatan, berupa dokumen-dokumen arsip resmi tentang Kongres Palang Merah Indonesia tahun 1959 di Surabaya dan Kongres Palang Merah Indonesia tahun 1963 di Jakarta, serta berbagai buku mengenai sejarah pergerakan kepalangmerahan di Indonesia yang terdapat di Perpustakaan Nasional. Sumber Sekunder yang penulis gunakan adalah artikel koran maupun artikel berita daring yang terkait dengan pergerakan kepalangmerahan Indonesia era Orde Lama.

3. Verifikasi (Kritik Sejarah)

Setelah menentukan topik dan mengumpulkan sumber, tahap berikutnya adalah verifikasi atau kritik sejarah atau keabsahan sumber. Ada dua jenis verifikasi. Verifikasi diartikan sebagai menentukan keaslian dan kebenaran sumber. Verifikasi dibagi menjadi dua macam,

yaitu autentisitas atau keaslian sumber atau kritik ekstern dan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern.

- **Autentisitas**

Penulis berhasil menemukan dokumen sumber berupa buku, surat kabar, maupun sebuah monograf. Dokumen-dokumen yang berhasil penulis temukan merupakan dokumen autentik dari gedung Arsip Nasional Republik Indonesia yang mana kebanyakan dari kertas-kertas dokumen sumber tersebut sudah menguning bahkan rapuh sehingga rawan mengalami robekan karena termakan usia. Lalu gaya penulisannya, bahasanya, serta hurufnya juga masih menggunakan ejaan lama sehingga belum menggunakan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan).

- **Kredibilitas**

Sesudah memastikan bahwa dokumen sumber tersebut autentik, penulis juga sudah memastikan bahwa dokumen sumber tersebut dapat dipercaya. Dalam hal ini, penulis telah meneliti perkembangan Palang Merah Indonesia era Orde Lama (1959 – 1963) dan

membuktikan bahwa Palang Merah Indonesia benar-benar mengalami perkembangan pada era Orde Lama (1959 – 1963) melalui dokumen sumber-sumber yang ada. Untuk kredibilitas foto serta gambar dari dokumen yang berhasil ditangkap juga sudah lazim pada kurun waktu tersebut. (Barnes, 1963)

4. Interpretasi

Interpretasi dapat diartikan sebagai proses penafsiran sumber sejarah menjadi sebuah fakta sejarah. Interpretasi terbagi menjadi dua jenis, yakni analisis dan sintesis. Analisis adalah suatu tindakan dimana penulis menggali sumber sejarah untuk menemukan fakta sejarah yang bersifat tersirat atau tidak tertulis secara langsung. Sedangkan sintesis merupakan suatu tindakan penulis untuk menggabungkan fakta sejarah yang terdapat dalam suatu sumber sejarah menjadi fakta sejarah baru yang menciptakan suatu keterkaitan, baik secara korelasi maupun korespondensial. Sebagai contoh, setelah membandingkan kedua sumber dari kedua pihak yang berperan penting dalam penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa terdapat sekian kali kegiatan pertolongan bencana yang dilakukan Palang Merah Indonesia di seluruh penjuru negeri selama

era Orde Lama. (Barnes, 1963)

5. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Historiografi dapat dijabarkan sebagai suatu proses dimana seluruh fakta sejarah yang telah ditemukan dan dikumpulkan, akan melalui tahapan selanjutnya, yakni penulisan sejarah yang ditulis kedalam suatu karya ilmiah secara sistematis dan juga terstruktur (Taufik Abdurrachman Suryomihardjo, 1985).

Penulis menggunakan metode deskriptif naratif dalam penelitian sejarah dengan cara menuliskan seluruh fakta sejarah yang telah penulis temukan dan kumpulkan untuk menjawab semua rumusan masalah dengan menggunakan teori-teori yang memiliki keterkaitan.